

**BUDAYA POLITIK DAN IKLIM DEMOKRASI
DI INDONESIA****3***Oleh : M. Nur Alamsyah***ABSTRAK**

Masyarakat Indonesia dan elitnya pada penyelenggaraan kekuasaan sering memakai kekuasaannya tanpa control atau kendali akibatnya, aturan permainan dan hukum kerap tidak dijadikan koridor dalam pelaksanaan kenegaraan dan kehidupan kemasyarakatan. Kepercayaan (trust) masyarakat menjadi sangat lemah terhadap hukum atau aturan, budaya politik. Hal tersebut melemahkan disiplin sosial yang telah memiliki cikal bakal dan catatan sejarah dalam masyarakat Indonesia secara luas.

Pada setiap aktifitas dalam setiap proses politik masyarakat, akan senantiasa terjadi dalam lingkup budaya, yang dapat digambarkan bahwa pada jangka waktu tertentu, akan selalu terjadi proses dialektika timbal balik antara kehidupan politik di satu pihak dengan sistem nilai budaya masyarakat pada pihak lain, yang kemudian membentuk sebuah kepercayaan yang luas dan dijadikan sebagai sebuah komitmen meskipun hadir sebagai consensus yang tidak tercatat, tetapi dilakukan dan mengalami perbaikan secara kualitatif setiap saat. Keberhasilan penguatan budaya politik pada setiap bangsa dapat tercapai melalui proses sosialisasi politik. Proses inilah yang mewariskan berbagai nilai politik dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Kata Kunci: *Politik, Budaya Politik, Demokrasi*

Pendahuluan

Penggunaan Istilah budaya politik dalam khasanah pengkajian politik mulai dikenal terutama sejak aliran perilaku (*behavioralism*) pasca perang dunia II berakhir. Banyak para ahli yang memiliki pandangan-pandangan tertentu atas Budaya politik, dimana dalam literatur politik terkhusus pada salah satu pendekatan ilmu politik yaitu pendekatan perilaku, istilah Budaya politik digunakan untuk menjelaskan fakta yang hanya dilakukan dengan pendekatan kelembagaan atau pendekatan sistemik. Dengan kata lain menjelaskan dengan pendekatan budaya politik adalah upaya

menembus secara lebih dalam perilaku politik seseorang atau sebuah kelompok.

Salah satunya ahli pendekatan perilaku tersebut adalah Walter A Rosenbaum yang menyebutkan bahwa budaya politik dapat didefinisikan dalam dua cara. Pertama, jika terkonsentrasi pada individu, budaya politik merupakan fokus psikologis, atau dengan kata lain bagaimana cara-cara seseorang melihat sistem politik. Apa yang dia rasakan dan ia pikir tentang simbol, lembaga dan aturan yang ada dalam tatanan politik dan bagaimana pula ia meresponnya. Kedua, budaya politik yang merujuk kepada orientasi kolektif rakyat terhadap elemen-elemen dasar dalam sistem politiknya atau yang disebut “pendekatan sistem.

Disiplin sosial mempunyai kaitan yang sangat erat dengan budaya politik yang berlaku dan berkembang di masyarakat, disiplin social dapat diartikan sebagai kesadaran dan kemauan anggota masyarakat untuk dapat mematuhi ketentuan (baik tertulis maupun tidak tertulis) yang telah disepakati bersama yang diharapkan berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kesadaran dan kemauan itu akan muncul atau hadir bilamana nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat mendukung ketentuan-ketentuan yang dimaksud.

Suasana kebangsaan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia saat ini, juga pada penyelenggara kekuasaan sering memakai kekuasaannya tanpa control atau kendali sehingga ada degradasi kepercayaan ataupun upaya menghindari hukum sehingga aturan permainan dan hukum kerap tidak dijadikan koridor dalam pelaksanaan kenegaraan dan kehidupan kemasyarakatan. Kepercayaan (*trust*) masyarakat menjadi sangat lemah terhadap hukum atau aturan, budaya politik seperti itu akan melemahkan disiplin sosial.

Masyarakat Indonesia dan Budaya politik

Manusia yang ada dalam setiap kolektifitas komunitasnya akan senantiasa kental dengan obsesi dan kehendaknya akan sebuah kekuasaan (power). Hal tersebut merupakan kodrat yang telah dimiliki sebagai sebuah kelebihan dari aspek kemanusiaan sehingga akan selalu terdapat keterkaitan antara budaya dan politik. Dengan perkataan bahwa setiap aktifitas dalam setiap proses politik tersebut, akan senantiasa terjadi dalam lingkup budaya yang dalam pengertian

lain digambarkan bahwa dalam jangka waktu tertentu, akan selalu terjadi proses dialektika timbal balik antara kehidupan politik di satu pihak dengan sistem nilai budaya masyarakat pada pihak lain.

Selanjutnya dalam konteks pengkajian ini, apa yang kita maksudkan dengan budaya politik. Budaya politik merupakan orientasi dari tingkah laku masyarakat dalam mengapresiasi kekuasaan bagi mereka baik secara pribadi maupun kelompok. Atau menurut Almond dan Verba, masyarakat mengidentifikasi dirinya terhadap symbol-simbol dan lembaga-lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang dimilikinya. Dan dengan orientasi itu pula anggota masyarakat menilai dan mempertanyakan tempat dan peranan mereka dalam sistem politik.

Sebuah bangsa dapat tumbuh secara dinamis jika tercapai harmonisasi yang baik antar berbagai elemen negara yang terintegrasi dengan utuh. Liddle, Alfian, 1992:200) mengatakan bahwa integrasi nasional mempunyai 2 (dua) dimensi utama yaitu: dimensi horizontal dan dimensi vertical. Dimensi horizontal adalah berupa masalah yang disebabkan oleh karena adanya perbedaan suku, ras, agama, aliran dan sebagainya (ikatan-ikatan primordial). Dimensi vertical yaitu masalah yang yang ditimbulkan oleh muncul dan berkembangnya jurang pemisah (gap) antara golongan elit nasional yang pasti akan lebih kecil jumlahnya dengan mayoritas rakyat secara keseluruhan.

Budayapolitik biasanya berpusat pada imajinasi/mindset (pikiran dan perasaan) pada basis individu, yang merupakan dasar semua tingkah laku politik masyarakat. Sementara sistem nilai yang hidup di masyarakat adalah merupakan variable penting bagi pembentukannya yang merupakan refleksi terhadap orientasi, sikap dan perilaku politik masyarakat dalam merespons setiap objek dan proses politik yang sedang berjalan sebab nilai tersebut adalah sebuah kebijakan bagi masyarakat tersebut.

Bagi para ilmuwan politik seperti Gabriel Almond, Sidney Verba dan Lucian W.Pye, yang telah lebih dahulu mengembangkan teori kebudayaan politik di mana riset yang dilakukan menunjukkan keterkaitan antara budaya dan politik. Bagi mereka bahwa setiap proses politik senantiasa terjadi dalam lingkup budaya. Atau jika diartikan lebih jauh bahwa, dalam jangka waktu tertentu mesti akan selalu terjadi proses dialektika antara kehidupan politik dengan sistem nilai budaya masyarakat.

Budaya politik adalah cerminan sikap khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, serta sikap akan peranan warga bangsa dalam sistem politik itu. Sehingga dengan demikian maka dia menjadi orientasi psikologis terhadap objek sosial pada sistem politik sebuah komunitas, dan melalui proses internalisasi ke dalam bentuk orientasi yang bersifat kognitif (pemahaman/pengetahuan dan keyakinan), afektif (ikatan emosional/perasaan terkait, keterlibatan, penolakan dan sejenisnya tentang obyek politik) dan evaluatif (penilaian) atau opini tentang obyek politik yang biasanya melibatkan nilai-nilai standar terhadap obyek politik dan kejadian-kejadian. Budaya politik juga merupakan rangkaian kepercayaan, kebiasaan dan perilaku yang berkaitan dengan kehidupan politik.

Budaya Politik pada hakikatnya merupakan lingkungan psikologis dimana kegiatan-kegiatan politik berlangsung dan memberikan rasionalisasi untuk dapat memberikan penolakan atau penerimaan sejumlah nilai dan norma yang lain. Dalam kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk, maka kesediaan bangsa untuk dapat meningkatkan integrasi politik hanya dapat dimaknai ketika masyarakat bersedia untuk mempersempit gerakan ikatan-ikatan primordial yang dicapai melalui tindakan sadar, sukarela yang bersumber dari berbagai komponen masyarakat yang ada.

Pandangan lain adalah dari Albert Widjaja menyatakan budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang terdiri ide, pengetahuan, adat istiadat, tahayul dan mitos. Kesemuanya ini dikenal dan diakui sebegini besar masyarakat. Budaya politik tersebut memberi rasional untuk menolok atau menerima nilai-nilai dan norma lain. Ia malah menyamakan budaya politik dengan konsep "ideologi" yang dapat berarti "sikap mental", "pandangan hidup", dan "struktur pemikiran". Budaya politik bagi Albert Widjaja akan lebih menekankan ideologi yang umum berlaku di masyarakat, bukan ideologi perorangan yang sifatnya bersifat khusus dan beragam.

Dalam kehidupan masyarakat dapat dijumpai setidaknya tiga tipe budaya politik, yaitu masyarakat dengan budaya parokial, kawula, dan partisipan. Masyarakat di mana sikap dan orientasi politiknya sangat didominasi oleh karakteristik yang bersifat kognitif maka akan membentuk budaya politik yang parokial. Masyarakat sama sekali tidak menyadari untuk apa mereka melakukan kegiatan

politik. Kesadaran kognitif politiknya terbatas pada pengetahuan bahwa kekuasaan politik memang ada dalam masyarakat, dan keikutsertaannya lebih banyak karena mobilisasi, solidaritas atau ikut-ikutan.

Dalam sebuah masyarakat yang mempunyai kecenderungan sikap dan orientasi politik dengan karakteristik yang bersifat *afektif*, maka akan membentuk budaya politik yang bersifat kaula. Masyarakatnya akan lebih cenderung bersifat pasrah dengan kondisi “*nrimo*” karena merasa tak mampu mengubah/menolak sistem politik yang ada, sehingga jalan keselamatan yang dapat dipilih menurutnya tak lain yaitu patuh “manut”, setia dan mengikuti segala instruksi serta anjuran pemimpin politiknya.

Adapun masyarakat yang sangat dominan memiliki kompetensi politik yang tinggi, di mana warga masyarakat mampu memberikan evaluasi terhadap proses politik yang sedang berlangsung, akan dapat membentuk sebuah budaya politik yang lebih partisipan. Dimana masyarakat sudah memulai melibatkan diri secara intensif dalam berbagai kegiatan politik yang berlangsung. Menurut Nazaruddin Sjamsuddin, pada dasarnya sebuah proses yang baik akan tercipta dalam kultur yang lebih baik jika dapat melibatkan tahap penyesuaian antara budaya politik lokal dengan struktur politik nasional, atau penataan berbagai struktur politik bangsa senantiasa mengambil keberagaman karakter budaya politik local yang baik (*indigenus local*) sehingga dapat mengurangi resistensi penolakan di masyarakat.

Harus ada penghargaan terhadap budaya politik lokal yang sudah kukuh, disebabkan nilai tersebut telah ada jauh sebelum masa kemerdekaan. Untuk itu dalam konteks keindonesiaan, dibutuhkan penyesuaian dengan struktur politik nasional yang baru tumbuh dan berkembang sejak kemerdekaan yang memiliki dinamika pertumbuhannya sesuai pasang surut rejim pemerintahan yang membawanya. Apa yang tercermin pada berbagai wujud budaya politik lokal yang ada di Indonesia saat ini, sesungguhnya cukup dapat mencerminkan bagaimana hubungan suatu daerah dengan pengaruh yang datang dari luar.

Karakter budaya politik di negara lain tentunya akan sangat berbeda dengan yang ada di Indonesia, sebagai perbandingan di negara Amerika Latin yang secara typologis negara sama dengan Indonesia melahirkan jenis-jenis budaya politik dominan antara lain

seperti; *Elitisme, Otoritarianisme, Hirarkisme, Patrimonialisme* atau yang lainnya seperti *Militerisme, Sosial demokratisme, Marxisme, Liberal democracy, Catholisism*

Budaya politik lokal yang “berwarna keras” melahirkan daerah yang tertutup terhadap pengaruh nilai-nilai dari luar, sekalipun nilai-nilai tersebut belum tentu bertentangan dengan nilai-nilai yang telah ada. Hal ini dapat secara cepat dijadikan sebagai senjata oleh komunitas atas nama lokalitas di era reformasi untuk penyelenggaraan desentralisasi terutama pada posisi rekrutmen kepemimpinan di daerah dengan slogan “Putra Daerah”. Sebaliknya, budaya politik lokal yang “berwarna lunak” akan lebih bersifat terbuka, karena lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat yang mempunyai nilai yang berbeda sehingga lebih berorientasi pada integrasi kebangsaan yang mengedepankan pada aspek kompetitiveness dan kapabilitas.

Dasar integrasi dan stabilitas masyarakat adalah tradisi dan nilai bersama yang menjejantah dalam struktur sosial. Disini dipandang bahwa distribusi kekuasaan, *privilege*, dan *prestise* dianggap sebagai hal yang adil, perlu dan menguntungkan individu dan kesejahteraan sosial. Teori fungsional tersebut menurut Seda;1992 (dalam MM. Billah; 1993) bahwa, Kesepakatan nilai bersama tersebut, dijewantahkan dalam pranata kehidupan masyarakat dimana hal tersebut dilakukan untuk memberikan motivasi kepada anggota masyarakat, sehingga diperlukan sistem imbalan (*reward*) pada tiap-tiap posisi dalam masyarakat yang diduduki oleh yang paling mampu dan berbakat.

Budaya politik akan sangat menentukan pola pemerintahan dalam menjalankan kekuasaannya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pucuk kekuasaan pemerintahan cenderung penuh dengan pergulatan, tarik menarik kepentingan politik antara elit pemerintah dan pemain politik di luar birokrasi. Politik akan dapat menjelma sebagai alat mempertahankan kekuasaan, namun juga dapat merubah keadaan menjadi lebih baik (reformasi). Segala hal tersebut, tergantung sejauh mana budaya politik Indonesia melegitimasi campur tangan elit politik dalam pemerintahan.

Arah Pematapan Budaya Politik

Dalam derajat yang tertinggi, budaya politik umumnya akan dapat membentuk aspirasi, obsesi, preferensi dan prioritas tertentu dalam menghadapi tantangan yang diakibatkan oleh perubahan politik pada suatu bangsa. Dengan sikap dan orientasi seperti itu, disertai dengan adanya determinan nilai-nilai keunggulan lokal (*local genius*) maka akan dapat dijumpai berbagai tipe budaya politik lokal yang berbeda-beda di berbagai daerah, sesuai dengan faktor-faktor yang umumnya mendominasi meskipun juga dalam menumbuhkan budaya politik nasional tentunya akan lahir melalui berbagai mekanisme.

Integrasi politik yang tinggi, secara langsung akan memudahkan pemerintah untuk dapat memudahkan proses pengambilan keputusan didalam sistem politik, sebab masyarakat akan dapat lebih memahami tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah, dimana hal tersebut akan sangat ditentukan oleh perkembangan budaya politik yang matang. Sebagaimana yang banyak dikemukakan bahwa kematangan budaya politik suatu bangsa merupakan syarat utama bagi integrasi bangsa yang berkadar tinggi (Ake, dalam Nazruddin, 1989;28). Dengan kata lain bahwa untuk mencapai proses ini akan sangat membutuhkan kesediaan rakyat untuk dapat menjaga integrasi politik.

Beberapa orientasi budaya politik yang dikemukakan oleh Rosenbaum terkait elemen-elemen tatanan politik. Yaitu:

1. *Orientasi terhadap struktur pemerintahan.*
 - a. Orientasi rejim, bagaimana individu mengevaluasi dan merespon terhadap lembaga pemerintahan, simbol-simbol, para pejabat dan norma-normanya.
 - b. Orientasi terhadap inputs dan outputs pemerintah, bagaimana individu merasakan dan merespon terhadap tuntutan untuk kebijakan publik dan kebijakan yang diputuskan pemerintah.
2. *Orientasi terhadap elemen lain dalam sistem politik*
 - a. Orientasi identifikasi, kesatuan politik, wilayah geografis dan kelompok dimana ia merasa memilikinya.
 - b. Kepercayaan politik, sejauh mana seseorang merasa terbuka, kooperatif atau bersikap toleran dalam bekerja dalam kehidupan masyarakat.
 - c. “Aturan permainan”, konsep individu tentang aturan mana yang harus diikuti dalam kehidupan kenegaraan.

3. Orientasi terhadap Aktivitas Politiknya

- a. Kompetensi Politik, seberapa sering dan dalam cara bagaimana seseorang berpartisipasi dalam kehidupan politik, mana yang paling sering digunakan sebagai sumber politik baginya dalam masalah kenegaraan.
- b. Political Efficacy, perasaan bahwa tindakan politik individu memiliki atau dapat menghadirkan pengaruh atas proses politik.

Pembangunan politik yang menjadi arah dalam pengembangan budaya politik mengandung tiga dimensi (Alfian, 1990;258-259) yang satu dengan lainnya yang saling berkaitan, yaitu: 1. Dimensi preventif; 2 dimensi pemeliharaan; 3 dimensi pengembangan;. Dimensi preventif dibutuhkan untuk mencegah agar dalam proses pembangunan politik tidak akan menjurus kepada hal-hal yang menyimpang dari semula, hal ini dapat dilihat dengan pelarangan terhadap ideologi-ideologi politik atau kekuatan politik tertentu yang dianggap merongrong proses pembangunan politik itu sendiri. Secara hakiki, dimensi preventif berfungsi mengamankan jalan proses pembangunan politik dari berbagai tantangan atau ancaman bahaya yang mungkin timbul sehingga lebih kental dengan *security*.

Adapun dimensi pemeliharaan kepentingan untuk dapat memperhatikan atau memelihara berbagai hal yang sudah ada dan merupakan bagian integral dari sistem politik yang akan dibangun. Perhatiannya akan lebih kepada lembaga-lembaga politik yang sudah ada dapat berfungsi sebagaimana mestinya sesuai tuntutan konstitusi, terutama pada lembaga-lembaga atau institusi-institusi politik seperti parpol. Dimensi ini dapat di sebut dimensi institusionalisasi dan fungsionalisasi yaitu bagaimana agar institusi-institusi politik terpelihara dan berfungsi sebagaimana mestinya. Dampak dari kegagalan tersebut tidak mengokohkan sistem politik yang demokratis, melainkan akan lahir sistem politik yang rapuh sehingga bukan pembangunan politik yang terjadi sehingga malah akan dapat menimbulkan proses pembusukan politik (*political decay*).

Iklm demokrasi yang menjadi janji bagi kehidupan yang lebih baik dimata masyarakat saat ini semakin jauh dari janjinya sehingga menjadi hanya sekedar isapan jempol dalam menciptakan pemimpin-pemimpin dan wakil rakyat yang sangat kuat intonasi suara sehingga memekakkan telinga masyarakat sehingga

menimbulkan animo masyarakat untuk dapat bangkit tetapi pada realitasnya sangat miskin dalam realisasi tindakan dan implementasi. Perbandingan terbalik kemudian terjadi ketika rakyat memahami demokrasi sebagai kebebasan melakukan segala sesuatu mulai dari memilih pimpinan, menurunkan pimpinan, sampai secara berlebihan melakukan tindak kekerasan antara sesama masyarakat dalam memperjuangkan, mempertahankan kepentingan politik individu maupun kelompoknya. Sesungguhnya ini merupakan implikasi kehidupan demokrasi yang tidak dimaknai sebagai sebuah proses pendidikan politik untuk menciptakan budaya politik yang baik melainkan sebuah proses degradasi politik yang dibingkai dalam ruang demokrasi yang sesungguhnya totalitarian.

Kondisi tersebut mengharuskan dimensi pengembangan, pembangunan politik pada kebutuhan untuk mengembangkan kapasitas dan kapabilitas suatu sistem politik agar dapat menyelesaikan beban berat dinamika perkembangan masyarakat secara memuaskan. Pengembangan kapasitas dan kapabilitas sistem politik salah satunya dapat dilakukan melalui pengembangan lembaga-lembaga politik beserta fungsinya dengan pengembangan pendidikan politik kepada masyarakat.

Kematangan budaya politik suatu bangsa, sekali lagi secara prinsipil akan sangat ditentukan oleh adanya keserasian antara kebudayaan bangsa tersebut dengan struktur politiknya, sehingga semakin serasi struktur politik dengan aspek-aspek budaya bangsa itu, maka akan semakin matang pula budaya politiknya.

Keniscayaan Demokrasi

Dari studi yang dilakukan oleh Almond dan Verba ditemukan bahwa negara-negara yang mempunyai budaya politik yang sudah matang akan menopang demokrasi yang stabil. Sebaliknya, negara-negara yang memiliki derajat budaya politik yang belum matang tidak mendukung terwujudnya demokrasi yang stabil. Kematangan budaya politik tersebut ditunjukkan dengan peluang yang diberikan oleh negara kepada masyarakat untuk mandiri, sehingga memiliki tingkat kompetensi yang tinggi.

Pengembangan budaya politik dapat terbangun juga harus ditopang oleh Etika yang terdiri dari 3 cakupan: *metaethics* (studi tentang konsep etika); *normative ethics* (studi tentang bagaimana menentukan nilai etika); dan *applied ethics* (studi mengenai

penggunaan nilai etika). Dalam perkembangan bangsa-bangsa didunia telah mengajarkan bagaimana berperilaku politik yang baik. Pengajaran klasik akan hal tersebut sangat melekat pada kondisi di Yunani Kuno, konsep polis (negara kota) Athena misalnya dengan menjalankan politik tanpa kekerasan sebab kegiatan politik dengan kekerasan dalam konsep etika politik masa itu dianggap lekat dengan kaum barbarian yang tidak memiliki peradaban.

Kasus menarik dalam proses demokrasi Indonesia terkait etika politik yang dibangun dari budaya politik adalah peristiwa dalam pemilu presiden dan wakil presiden 2009 adalah pernyataan salah seorang anggota Tim Kampanye Capres-Cawapres Sby-Budiono yang diungkapkan secara terbuka di Makassar bahwa belum saatnya orang Bugis untuk menjadi presiden yang kemudian mendapatkan tanggapan secara luas dari komunitas identitas etnik Bugis/Makassar atau secara luas masyarakat Sulawesi Selatan. Fenomena tersebut bila dilihat dari kematangan budaya politik merupakan wujud belum terciptanya iklim pemahaman moralitas politik yang kurang baik pada setiap actor politik yang kemudian rela menyinggung prinsip-prinsip terdekat secara ideologis yang sesungguhnya dalam consensus demokrasi menjadi taboo untuk digunakan sebagai bahan bakar pemenangan. Kasus-kasus penggunaan identitas sebagai “jargon” dalam pemenangan kompetisi suksesi kepemimpinan yang paling banyak terjadi adalah pada mekanisme Pilkadaes (pemilihan kepala daerah secara langsung).

Fenomena lain tentunya berbeda jika diungkapkan dalam diskusi ilmiah, hal tersebut tentunya merupakan sebuah realitas yang tak terbantahkan dan wajar, namun dalam sebuah kampanye yang dibangun diatas keutuhan/integritas bangsa yang tinggi sebagai dasar dari penyelenggaraan pemilu, maka hal tersebut bertentangan dengan hakekat dasar pelaksanaan Pemilu yang mengedepankan pada persatuan dan kebangsaan.

Mengapa etika politik tersebut sangat penting, pendapat menarik disampaikan Haryatmoko (2003) yang mengatakan ada 3 (tiga) alasan pentingnya etika politik, yaitu: Pertama, betapa pun kasar dan tidak santunnya suatu politik, tindakannya tetap membutuhkan legitimasi; kedua, etika politik berbicara dari sisi korban. Politik yang kasar dan tidak adil akan mengakibatkan jatuhnya korban; dan ketiga, pertarungan kekuasaan dan konflik kepentingan yang berlarut-larut akan membangkitkan kesadaran

tentang perlunya penyelesaian yang mendesak dan adil. Dari penekanan diatas jika melihat kasus penggunaan instrument nilai-nilai SARA dalam kegiatan politik seperti yang dikemukakan diatas, hal tersebut akan tertanam sebagai memori kolektif masyarakat yang dapat kita ukur pada pra dan pasca kongres II partai demokrat yang menunjukkan masih kuatnya rasa sakit yang didera oleh sebagian masyarakat etnis bugis/ Makassar terhadap elit politik tersebut yang kemudian melampiaskannya dengan berbagai cara seperti penggalangan facebook belum saatnya orang bugis Makassar memimpin partai demokrat sampai pernyataan miring yang disampaikan atas kekalahan mutlak yang dialaminya pada putaran pertama. Ini akan terus menerus terjadi jika disiplin social untuk membangun keharmonisan politik dalam wujud etika politik yang terbangun dari nilai-nilai substansi demokrasi yang berakar didalam masyarakat Indonesia.

Demokratisasi dan budaya politik demokratis hanya bisa diciptakan setelah melalui proses sosialisasi politik. Proses ini mewariskan berbagai nilai politik dari satu generasi ke generasi berikutnya, lewat berbagai agen, seperti keluarga, teman sepergaulan, sekolah/ perguruan tinggi, dan media massa yang menghasilkan individu yang sadar akan peran dan posisinya secara lebih mandiri. Walau demikian, demokratisasi yang kuat dan meluas serta perwujudan sistem politik yang demokratis dan stabil, tidak akan pernah muncul, bila budaya politik kita masih didominasi oleh pola hubungan yang bersifat *hirarkis*, *patronage* serta gejala *neo-patrimonialisme*.

Kesimpulan

Mengatasi berbagai kondisi carut marut yang ada saat ini, mungkin dapat diatasi ketika bangsa Indonesia dapat melakukan transformasi budaya politik bangsa yaitu menggantikan budaya politik lama yang masih sangat dipengaruhi orientasi, sikap dan tingkah laku politik masyarakat kita yang berwawasan terbatas dengan budaya politik sesuai landasan dan filosofi negara serta konstitusi kebangsaan kita dalam UUD 1945.

Menguatnya segmentasi nilai-nilai identitas tradisional masyarakat sesungguhnya menguat ketika tidak ada *punishment* yang jelas dari mekanisme hukum atas pemanfaatan identitas tersebut untuk menciptakan kekuasaan melalui politik efek domino yang

ditimbulkan yang secara langsung mendapatkan kecaman tetapi pada efek lain mendapatkan efek besar lain. Hal tersebut harus dapat dilihat sebagai kejahatan dan upaya untuk menghancurkan komitmen kebangsaan yang telah terbangun diatas kepercayaan yang rapuh. etika dalam politik yang merupakan instrument dasar budaya politik sesungguhnya memungkinkan terciptanya etika solidaritas. Etika bentuk seperti ini akan menjamin mengemukanya nilai-nilai bersama ketimbang semangat kepentingan kesukuan atau primordialisme sebab dengan adanya etika politik yang baik akan menciptakan trust atau kepercayaan dan persahabatan.

Demokrasi di Indonesia, tidak akan tercipta secara utuh langsung seperti yang terjadi di Eropah yang lebih homogen ataupun di Amerika Serikat meskipun heterogenitasnya tinggi tetapi dilingkupi budaya, kelengkapan, sistem dan kondisi yang memungkinkan dilakukannya sosialisasi politik secara baik dengan tingkat pendidikan masyarakat yang lebih baik.

Kondisi tersebut tidak dimiliki bangsa Indonesia, sehingga iklim demokrasi yang dapat diciptakan dan diterima oleh komunitas budaya yang ada harus melalui tahapan-tahapan yang sistematis dengan penyadaran kepada seluruh identitas budaya terutama mengindonesiakan identitas budaya yang relative besar sehingga tidak tumbuh sebagai budaya totaliter yang menghegemoni.

Daftar Pustaka

- Alfian, 1992. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia (Kumpulan Karangan)*, PT. Gramedia, Jakarta
- , cet kedua 1990. *Masalah dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia (kumpulan Karangan)*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Nazaruddin Syamsuddin, 1989. *Integrasi politik di Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta
- Sudijono Sastroamidjoyo, 1995. *Perilaku Politik*, IKIP Semarang Press. Semarang
- Affan Gaffar, 1999. *Politik Indonesia, Transisi menuju demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Gabriel Almond dan Sidney Verba diterj(Sahat Simamora),1984. *Budaya Politik tingkah laku politik dan demokrasi di Lima negara*, Bina Aksara, Jakarta
- Almond, Gabriel A. and G Bingham Powell, Jr., *Comparative Politics: A Developmental Approach* . New Delhi, Oxford & IBH Publishing Co, 1976
- M. Nur Alamsyah, 2005. *Politik Memilih Transmigran Jawa*, (thesis) UGM Yogyakarta
- Eep Saefullah Fatah, 1994. *Masalah dan Prospek demokrasi di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Riswandha Imawan, 1997. *Membedah Politik Orde Baru*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Anderson, Benedict, R. O'G., *Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia* . Ithaca: Cornell University Press, 1990.
- Emmerson, Donald, K., *Indonesia's Elite: Political Culture and Cultural Politics*. London: Cornell University Press, 1976.
- Suryadinata, Leo, *Golkar dan Militer: Studi Tentang Budaya Politik* . Jakarta: LP3ES, 1992.
- Widjaya, Albert, *Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: LP3ES, 1982